

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra ini selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 serta segenap ketentuan pelaksanaannya juga didorong oleh keinginan untuk mendalami secara analitis segenap potensi dan sumber daya yang tersedia guna diakomodasi sebagai sumber kekuatan organisasi serta keinginan untuk lebih mengenal faktor-faktor penghambat, peluang dan tantangan guna dirumuskan melalui metode kajian rencana strategik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggala umumnya dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

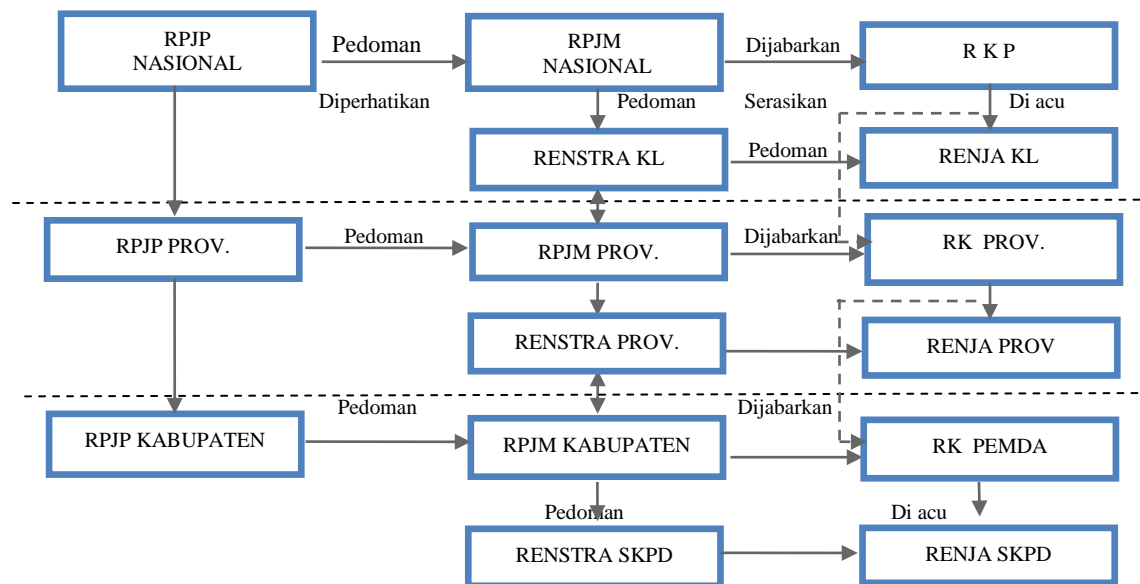
Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi dan teknologi informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Donggala.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan dan komunikasi di Kabupaten Donggala dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :



Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Donggala menyusun Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala Tahun 2014 – 2019 berdasarkan hal-hal tersebut diatas.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala 2014 – 2019, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 523);
9. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
10. Undang-Undang No. 17 Tentang Pelayaran
11. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala 2014 – 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 – 2016.
3. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan visi, misi SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala sebagai berikut :

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 37 tahun 2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas–tugas yang dimaksud, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai fungsi: 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Didalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan

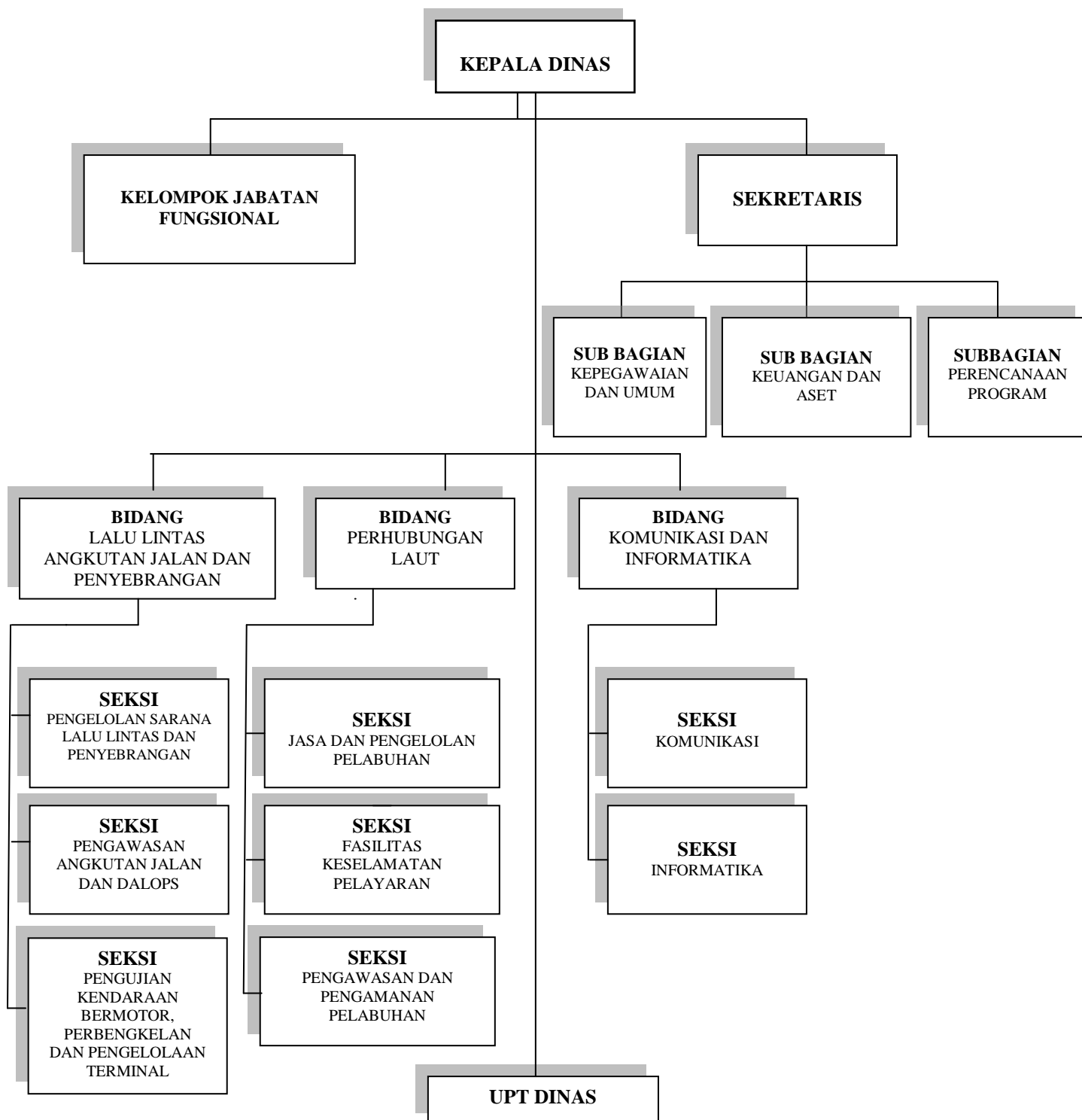
Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Yang mengatur bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan / mandat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Penyebrangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sarana Lalu Lintas dan Penyebrangan;
 2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan dan Dalops;
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perbengkelan dan Pengelolaan Terminal.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Jasa dan Pengelola Pelabuhan;
 2. Seksi Fasilitas Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Pelabuhan;
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Balai Pengujian Kendaraan Bermotor)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA**

Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala



Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi:

1) Kepala Dinas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggaladipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- o Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan, pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
- c. Bidang Perhubungan Laut
- d. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Balai Pengujian;

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

- d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian, mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian, mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyebrangan

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten.
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas untuk umum.
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
4. Pengawasan penyelenggaraan mengemudi
5. penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
6. Pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang Tipe C.
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
8. Pembangunan terminal angkutan barang.

9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
11. Penyusunan dan Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota.
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.
16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.
24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten.
25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
28. Pelaksanaan penyelidikan penyelenggaraan :
 - a. Perda kabupaten bidang LLAJ.
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum.
29. Pengumpulan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

38. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
39. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
40. Pengadaan kapal SDP.
43. Pembangunan pelabuhan SDP.
44. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
45. Penyelenggaraan pelabuhan Sungai dan danau.
46. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr / DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi nasional dan antar Negara.
47. Penetapan rencana induk DLKr/ DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan kabupaten.
48. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
49. Izin Pembuatan tempat penimbunan kayu (Logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau.
50. Penataan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.
51. Pembangunan, pemeliharaan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.
52. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada litas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
53. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.

54. Pengawasan pelaksanaan tariff angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
55. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak di usahakan yang di kelola kabupaten.
56. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan pada kabupaten.
57. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
58. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.

b. Bidang Perhubungan Laut.

1. Pemberian surat izin bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT 7) yang belayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau).
2. Bagi Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT 7) yang belayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) untuk :
 - a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - c. Penerbitan pas perairan daratan.
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - h. Penerbitan sertifikasi keselamatan kapal.

- i. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
3. Pemberian rekomendasi bagi kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan 7 (GT 7) yang belayar dilaut.
4. Terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT 7) yang belayar dilaut.
 - a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - c. Penerbitan pas kecil.
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - g. Penerbitan sertifikasi keselamatan kapal.
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - i. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
6. Pengolahan pelabuhan local lama.
7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub. Internasional dan nasional.
9. Penetapan rencana induk pelabuhan local.
10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut local.
13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus local.

14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut local.
15. Penetapan izin pegoperasian pelabuhan khusus local.
16. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut internasional hub.
17. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut internasional.
18. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut nasional.
19. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut regional.
20. Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut local.
21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/ atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan kapal.
22. Izin kegiatan pengukuran di wilayah perairan pelabuhan khusus local.
23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus local.
24. Penetapan DUKS di pelabuhan local.
25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan local (Kabupaten).
26. Izin kegiatan pengerukan di dalam di dalam DLKr / DLKp pelabuhan laut local.
27. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut local
28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus local.
29. Penetapan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan husus lokal .
30. Rekomendasi penetapan pelabuha yang terbuka bagi perdagangan luar negeri .

31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten .
32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
36. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (temporer) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan setempat.
37. Laporan peningkatan kapal dalam terayek tetap dan teratur (Liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (teranper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
38. Izin usaha tally di pelabuhan.
39. izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
40. Izin usaha ekspedisi atau fright forwarder.
41. Penempatan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (Rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.

c. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pemeberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (and tu and) cakupan kabupaten.
3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
4. Pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah atau gedung/(IKL/G).
5. Pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
6. Pemberian izin kantor cabang dan lokal pelayanan operator.
7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
8. Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
9. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalaran kabel telekomonikasi dalam satu kabupaten.
10. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
11. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
12. Pemberian izin instalansi genset.

13. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
14. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
15. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan Negara tetangga.
16. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
17. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Personil SKPD

Berdasarkan formasi yang ada sesuai struktur organisasi dan kelompok-kelompok tugas yang perlu diemban, maka jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural, fungsional, Kepala Terminal / Kepala Pos Pengawasan, Staf Administrasi Kantor, Kepala Satuan Tugas Operasi Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, PPNS, Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan, Pemeriksa Teknis Kendaraan pada Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Administrasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Administrasi Terminal / Pos Pengawasan, Petugas Pelaksana / Anggota Terminal dan Pos Pengawasan, Anggota Satgas Operasi Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, Pengemudi, Penjaga Kantor, Petugas Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor, Pengantar

Surat, Teknisi Penerangan dan Elektronik, Operator Komputer, seluruhnya berjumlah 245 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian (Aparatur)

Jumlah Aparatur sebanyak 245 Orang Terdiri :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| 1. Pegawai Negri Sipil (PNS) | 76 | Orang |
| 2. Pegawai Harian Lepas (PHL) | 165 | Orang |
| 3. Supir Kantor | 2 | Orang |
| 4. Penjaga kantor | 2 | Orang |

Berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| 1. SMU atau Sederajat | 216 | Orang |
| 2. Sarjana Muda/Diploma III | 1 | Orang |
| 3. Sarjana Strata I (SI) | 14 | Orang |
| 4. Sarjana Strata II (S2) | 4 | Orang |

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|----|-------|
| 1. Golongan I | 4 | Orang |
| 2. Golongan II | 46 | Orang |
| 3. Golongan III | 21 | Orang |
| 4. Golongsn IV | 5 | Orang |

Berdasarkan jabatan (eselon) dapat dirinci sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|----|-------|
| 1. Non Eselon | 60 | Orang |
| 2. Eselon IV | 11 | Orang |
| 3. Eselon III | 4 | Orang |
| 4. Eselon II | 1 | Orang |

Berdasarkan gambaran diatas, jelas terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara Jenjang Pendidikan yang terdapat pada personil dishubkominfo, sehingga perlu banyak dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya kerja dan daya pikir dari personil yang ada.

2.2.2 Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) SKPD

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Donggala saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja Dishubkominfo
Kabupaten Donggala Tahun 2014

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Gedung Kantor Permanen	2Unit	
02	Kendaraan Roda Empat	4 Unit	
03	Kendaraan Roda Dua	7 Unit	
04	Genset	1 Unit	
RUANG KEPALA DINAS			
01	Band Kas	2Unit	Baik
02	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
03	Lemari Besi	1 Buah	Baik
04	Meja Pempinan Eselon II	1 Buah	Baik
05	Kursi Kerja Ess II	1 Buah	Baik
06	Kursi Lipat	3 Buah	Baik
07	Rak TV	1 Buah	Baik
08	Meja Biro	1 Buah	Baik
09	Sofa	1 Set	Baik
10	Jam Mekanis	1 Buah	Baik
11	Papan Informasi	1 Buah	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Garuda Pancasila	1 Buah	Baik
13	AC Split	2 Buah	Baik
14	Kain Gorden	4 Buah	Baik
15	Tirai Gorden	2 Buah	Baik
16	Fax	1 Buah	Baik
RUANG SEKRETARIAT			
01	Meja Kayu/Rotan	1 Buah	Baik
02	Kursi Tamu	1 Buah	Baik
03	Kuri Putar Eselon III	1 Buah	Baik
04	Kursi Lipat	2 Buah	Baik
05	Meja Komputer	2 Buah	Baik
06	Meja Biro	1 Buah	Baik
07	AC Split	1 Buah	Kurang Baik
08	Dispenser	2 Buah	Kurang Baik
09	CPU	1 Buah	Baik
10	Keyboard	1 Buah	Baik
11	Monitor	1 Buah	Baik
12	Notebook	1 Buah	Rusak
13	Lemari Arsip Dinamis	2 Buah	Baik
14	Proyektor	1 Buah	Baik
15	Kain Gorden	4 Buah	Rusak
16	UPS	1 Buah	Baik
RUANG TUNGGU SEKRETARIS			
01	Kursi Tamu	1 Buah	Baik
02	Papan pengumuman	1 Buah	Baik
03	Papan pengumuman	1 Buah	Baik
04	Meja Kayu	1 Buah	Kurang Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
05	Meja Picket	1 Buah	Baik
06	Kursi Lipat	3 Buah	Baik
07	TV 29 Inch Plasma	1 Buah	Baik
08	Kursi Rapat	2 Buah	Baik
09	Dispenser	1 Buah	Baik
10	Kaca Rias	1 Buah	Baik
11	Kursi Kayu	1 Buah	Baik
12	Terali	4 Buah	Baik
13	Kain Gorden	1 Buah	Baik
MUSHOLLAH			
01	Hub	1 Buah	Baik
02	Hub	2 Buah	Baik
03	Access Point	2 Buah	Baik
04	Kursi Plastik	4 Buah	Baik
05	Terali	10 Buah	Baik
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM			
01	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
02	Meja Biro	6 Buah	Baik
03	Meja Rapat	1 Buah	Baik
04	Lemari Arsip 3 Pintu	1 Buah	Baik
05	Lemari Arsip 2 Pintu	1 Unit	Baik
06	Rak Kayu	1 Buah	Baik
07	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
08	Kursi Lipat	1 Buah	Baik
09	Kipas Angin	1 Buah	Baik
10	Jam Mekanis	1 Buah	Baik
11	Terali	1 Buah	Baik
12	Kain Gorden	4 Buah	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN PENYEBRANGAN			
01	Air Conditioning	1 Unit	Baik
02	Kursi Tamu	2 Buah	Baik
03	Kursi Kerja Eseeelon III	1 Buah	Baik
04	Kursi Kerja Eseeelon Iv	3 Buah	Baik
05	Kursi Lipat	6 Buah	Baik
06	Kursi Plastik	2 Buah	Baik
07	Kursi Kayu	4 Buah	Baik
08	Meja Kerja	8 Buah	Baik
19	Meja Rapat	3 Buah	Baik
10	Lemari Arsip	4 Buah	Baik
11	Lemari Arsip Dinamis Princes	1 Buah	Baik
12	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
13	Lemari Rak	2 Buah	Baik
14	Lemari sorong	1 Buah	Baik
15	Papan pengumuman	4 Buah	Baik
16	Kain Gordeng	4 Buah	Baik
17	Mesin Tik	1 Buah	Baik
18	PC Unit	1 Buah	Baik
19	Note Book	1 Buah	Baik
20	Printer	1 Buah	Baik
21	Kipas Angin	1 Buah	Baik
22	Terali	1 Buah	Baik
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT			
01	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
02	Meja Kerja Eselon III	1 Buah	Baik
03	Meja Komputer	2 Buah	Baik
04	Meja Rapat	2 Buah	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
05	Meja kayu	1 Buah	Baik
06	Meja Kerja	3 Buah	Baik
07	Kursi Kerja Eselon III	1 Buah	Baik
08	Kursi Kerja Eselon IV	1 Buah	Baik
09	Kursi Rapat	5 Buah	Baik
10	Kursi Lipat	1 Buah	Baik
11	Kursi Besi	1 Buah	Baik
12	AC	1 Buah	Baik
13	PC Unit	1 Buah	Baik
14	Monitor	1 Buah	Baik
15	Mesin Tik	1 Buah	Baik
16	Kain Gorden	7 Buah	Baik
17	Jam	1 Buah	Baik
18	Film Projector	1 Buah	Baik
19	Personal Komputer	1 Buah	Baik
20	Personal Komputer Fiber	2 Buah	Baik
21	Printer	1 Buah	Baik
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
01	AC 1 PK	1 Buah	Baik
02	Meja Rapat	2 Buah	Baik
03	Meja Biro	3 Buah	Baik
04	Kursi Rapat	3 Buah	Baik
05	Kursi Putar	2 Buah	Baik
06	Kursi Lipat	1 Buah	Baik
07	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
08	PC	4 Unit	Baik
09	UPS	4 Unit	Baik
10	Laptop	1 Unit	Baik
11	Terali	3 Buah	Baik

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	K E T
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Kain Gorden	2 Buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Donggala melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Donggala. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Donggala beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

2.3.1. Angkutan Jalan

a. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi

suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Donggala memiliki 5 terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2.2
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Luas (M ²)	Ket.
1.	Banawa	Jl. Trans Palu - Donggala	C	2.640	
2.	Watatu	Jl. Trans Sulawesi	C	8.550	
3.	Labuan	Jl. Trans Sulawesi	C	5.456	
4.	Sioyong	Jl. Trans Sulawesi	C	2.950	
5.	Ogoamas	Jl. Trans Sulawesi	C	3.000	

Tabel 2.3
Fasilitas Terminal Banawa

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
1 Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan		√			
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan		√			
c. Tempat parkir	√		√		
d. Bangunan kantor	√		√		
e. Tempat tunggu penumpang	√		√		
f. Menara pengawas		√			
g. Loker	√		√		
h. Pelataran parkir bus	√		√		
i. Rambu					
1) Papan Pengumuman		√			
2) Daftar/papan tarif pertrayek		√			
3) Daftar/petunjuk jurusan		√			
2 Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	√		√		
b. Musholla		√			
c. Kios/Kantin		√			
d. Ruang pengobatan		√			
e. Ruang informasi	√		√		
f. Ruang Perwakilan	√		√		
g. Taman penghijauan	√		√		

Tabel 2.4
Fasilitas Terminal Watatu

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
1 Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan		√			
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan		√			
c. Tempat parkir					
d. Bangunan kantor					
e. Tempat tunggu penumpang	√		√		
f. Menara pengawas	√		√		
g. Loker	√		√		
h. Pelataran parkir bus	√		√		
i. Rambu					

1) Papan Pengumuman		√			
2) Daftar/papan tarif pertrayek		√			
3) Daftar/petunjuk jurusan		√			
2 Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	√		√		
b. Musholla		√			
c. Kios/Kantin		√			
d. Ruang pengobatan		√			
e. Ruang informasi		√			
f. Ruang Perwakilan		√			
g. Taman penghijauan	√		√		

Tabel 2.5
Fasilitas Terminal Labuan

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
1 Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan		√			
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan		√			
c. Tempat parkir	√		√		
d. Bangunan kantor	√		√		
e. Tempat tunggu penumpang	√		√		
f. Menara pengawas		√			
g. Loker	√		√		
h. Pelataran parkir bus					
i. Rambu					
1) Papan Pengumuman		√			
2) Daftar/papan tarif pertrayek		√			
3) Daftar/petunjuk jurusan		√			
2 Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	√			√	
b. Musholla		√			
c. Kios/Kantin		√			
d. Ruang pengobatan		√			
e. Ruang informasi		√			
f. Ruang Perwakilan		√			
g. Taman penghijauan		√			

Tabel 2.6
Fasilitas Terminal Sioyong

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
1 Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan		√			
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan		√			
c. Tempat parkir		√			
d. Bangunan kantor		√			
e. Tempat tunggu penumpang		√			
f. Menara pengawas		√			
g. Loker		√			
h. Pelataran parkir bus		√			
i. Rambu					
1) Papan Pengumuman		√			
2) Daftar/papan tarif pertrayek		√			
3) Daftar/petunjuk jurusan		√			
2 Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	√		√		
b. Musholla		√			
c. Kios/Kantin		√			
d. Ruang pengobatan		√			
e. Ruang informasi		√			
f. Ruang Perwakilan		√			
g. Taman penghijauan		√			

Tabel 2.7
Fasilitas Terminal Ogoamas

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
1 Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan		√			
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan		√			
c. Tempat parkir	√			√	
d. Bangunan kantor	√			√	
e. Tempat tunggu penumpang	√			√	
f. Menara pengawas		√			
g. Loker	√			√	
h. Pelataran parkir bus					
i. Rambu					

1) Papan Pengumuman		√			
2) Daftar/papan tarif pertrayek		√			
3) Daftar/petunjuk jurusan		√			
2 Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	√			√	
b. Musholla		√			
c. Kios/Kantin		√			
d. Ruang pengobatan		√			
e. Ruang informasi		√			
f. Ruang Perwakilan		√			
g. Taman penghijauan		√			

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Donggala dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), dimana Kabupaten Donggala merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari kota-kota di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan sebaliknya.
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Sulawesi Tengah (lintas Kabupaten/Kota).
- Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkatkecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalanserta marka jalan.

Tabel 2.8
Data Rambu Menurut Jenisnya

No.	Status	Peringatan	Larangan	Perintah	Petunjuk	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-
2	Jalan Propinsi	-	-	-	-	-
3	Jalan Kabupaten	54	1	45	32	132
Jumlah / Rata - rata		54	1	45	32	132

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo Kabupaten Donggala Tahun 2009 – 2013

NO	Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tingkat pelayanan administrasi yang tepat waktu	75 %	77 %	80 %	85 %	90 %	75 %	77 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	-	10	20	20	20	15	-	15	15	-	150 %	0 %	75 %	75 %	0 %
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	4	4	2	3	2	-	4	-	2	4	0 %	100 %	0 %	66,6 %	200 %
4	Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	10 %	20 %	40%	60 %	80 %	20 %	-	-	-	-	200 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubnga yang diadakan	20%	40 %	60 %	80 %	90 %	10%	30%	50 %	70 %	70 %	50 %	100 %	100 %	100 %	200 %

6	Jumlah Dokumen Perencanaan/Pengawasan dan pelaporan yang dibuat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah sarana dan Prasarana bidang kominfo yang diadakan	5	5	5	5	5	1	4	1	1	1	20%	80%	20%	20%	20%

Dari tabel 2.9 diatas, dapat dilihat kinerja pelayanan yang ditunjukkan melalui capaian indikator kinerja sasaran. Adapun rasio rata – rata capaian indikator kinerja sasaran sbb :3 (Dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian ≥ 100 persen, 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian ≥ 50 persen, 2 (dua) indikator sasaran dengan tingkat capaian dibawah 50 persen.

2.4. Tantangan dan Peluang SKPD

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dishubkominfo Kabupaten Donggala menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut :**Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD**

Tantangan :

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat/pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
3. Belum meratanya informasi ke pelosok desa;
4. Luasnya wilayah kerja.
5. Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam satu tata transportasi

Peluang :

1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala;
2. Suasana Kerja yang kondusif dan dinamis;
3. Sarana dan Prasarana kerja pendukung telah tersedia
4. Arah Kebijakan publik yang mendukung kemudahan akses informasi
5. Kemampuan Menggalang partisipasi pemangku kepentingan sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi

Permasalahan Internal

a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala, berjumlah 174 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang nonteknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel dibawah ini menunjukkan persebarannya tersebut:

Tabel 3.1
Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status	Persebaran				Jml
		Kantor Dishub Kominfo	Terminal	Pkb	Pos	
1	PNS	36	1	3	1	41
2	CPNS	12	10	2	10	34
Jumlah		48	11	5	11	75

Sumber : Dishubkominfo Kab. Donggala

Tabel 3.2
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S2	S1/ DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	Total
Jumlah	3	14	1	-	53	4	-	75

Sumber : Dishubkominfo Kab. Donggala

b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Donggala

Rendahnya Alokasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terutama pada dana alokasi umum mengakibatkan rendahnya realisasi infrastruktur di bidang perhubungan seperti pembangunan sarana dan prasarana lalu-lintas angkutan jalan antara lain : terminal dan kelengkapannya. Selain itu alokasi dana untuk pemeliharaan untuk sarana dan prasarana yang ada juga sangat minim sehingga banyak fasilitas perhubungan yang tidak dalam kondisi baik.

c. Kurangnya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal rutin dalam mencapai visi dan misi SKPD, akan tetapi evaluasi terhadap capaian keberhasilan kinerja tidak menjadi perhatian sehingga banyak program dan kegiatan yang dijalankan tidak memberikan dampak seperti yang diharapkan

Permasalahan Eksternal

a. Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum

Kurang representatifnya kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala mengakibatkan kurangnya minat masyarakat umum terutama kalangan menengah ke atas, maraknya beroperasinya kendaraan pribadi yang digunakan

sebagai angkutan umum (rental) menyisakan persoalan tersendiri di bidang transportasi. Selain unsur keamanan dan keselamatan penumpang, pendataan terhadap arus keluar-masuk penumpang di kabupaten Donggala menjadi kabur sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan strategis dalam hal penataan transportasi lalu-lintas angkutan jalan.

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan keselamatan berkendara

Tingginya jumlah kecelakaan lalu-lintas sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan berkendara. Tingkat kesadaran yang rendah memang menjadi masalah yang umum di seluruh wilayah Indonesia. Di pandang pada sisi kendaraan, kewajiban uji kelayakan kendaraan bermotor menjadi hal yang wajib bagi pengendara angkutan barang dan angkutan umum, akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan secara penuh sehingga banyak kendaraan yang tidak layak jalan tetapi masih dapat beroperasi.

Tabel dibawah ini menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas selama tahun 2010-2012 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Bulan dan Korban/Kerugian

Bulan	Jumlah Kejadian	Korban			
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Material (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Januari	1	1	-	-	500.000.000
2. Pebruari	-	-	-	-	-
3. M a r e t	45	15	18	15	18.000.000

4. April	14	7	8	2	7.000.000
5. Mei	10	5	5	2	9.500.000
6. Juni	12	3	8	2	8.000.000
7. Juli	4	1	2	2	5.500.000
8. Agustus	10	8	3	1	13.000.000
9. September	3	2	1	1	4.000.000
10. Oktober	-	-	-	-	-
11. Nopember	7	4	3	2	10.800.000
12. Desember	15	3	11	3	19.750.000
Jumlah2012	121	49	59	30	100.550.000.-
2011	134	52	69	29	106.650.000
2010	99	42	31	76	423.800.000

Sumber : Kepolisian Negara RI Resort Donggala

Lemahnya *Law Enforcement*, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun 3 tahun terakhir:

c. Kurang Terintegrasinya sistem transportasi dalam satu wilayah ;

Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) yang terpadu diharapkan dapat menunjang ketersediaan moda transportasi barang dan penumpang dalam satu wilayah, kurangnya pendataan dan evaluasi mengakibatkan arus transportasi barang dan penumpang bersifat konvensional tanpa adanya penataan baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sistem transportasi seperti ini mengakibatkan biaya transportasi sepenuhnya dikendalikan antara penyedia dan konsumen.

d. Kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Donggala terletak ditengah pulau sulawesi yang memiliki banyak potensi, ini karena Kabupaten Donggala terbagi atas dataran tinggi (daerah pegunungan yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan)dan dataran rendah (yang memiliki potensi berupa

produksi pertanian) serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Selain itu Kabupaten Donggala juga memiliki aset wisata yang cukup banyak, baik seni budaya maupun pariwisata, keberagaman kultur budaya yang meliputi budaya kaili dan bugis, budaya osing, budaya jawa serta keberagaman agama.

Apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Donggala.

e. Pengaruh dari daerah lain

Letak geografis Kabupaten Donggala yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain, mengakibatkan Kabupaten Donggala mendapat pengaruh/dampak dari aktivitas pembangunan dari Kabupaten tersebut, ini terlihat pada pengaruh perdagangan, pariwisata, budaya dan sebagainya.

Beberapa pengaruh yang dirasakan tersebut antara lain:

f. Pengaruh perdagangan

Hasil produksi pertanian Kabupaten Donggala yang banyak di jual ke Palu, Makassar, Gorontalo dan Manado baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kepentingan lainnya.

1. Pengaruh pariwisata

Banyaknya wisatawan yang ”mampir” ke Donggala untuk berwisata di buktikan dengan adanya onjek wisata laut yang terkenal ”Tanjung Karang”.

2. Pengaruh perdagangan (pasar hewan/sapi)
Merupakan pengaruh dari budaya terdahulu
 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpendidikan tinggi
- j. Merupakan pengaruh dari budaya dan masyarakat Sulawesi, hal ini dapat dijumpai sampai dipelosok daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan permasalahan diatas dan mengacu pada visi pemerintah daerah Kabupaten Donggala yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia maka Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang hendak dirumuskan harus berorientasi pada Mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif dan Efisien Melalui Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan . Perumusan Visi tersebut adalah dalam kerangka untuk mendukung pencapaian misi Keempat yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 (RPJMD) yaitu meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata.

Untuk mengoperasionalkan visi Dishubkominfo maka perlu dirumuskan misi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi tersebut adalah memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi Keempat pada RPJMD 2014-2019 yaitu:

1. Meningkatkan wilayah yang mendapatkan akses komunikasi dan Informasi
 - a. Rasio desa/kecamatan yang mendapatkan akses komunikasi dan informasi (internet)

- b. Transparansi Informasi publik
2. Meningkatnya infrastruktur perhubungan, dengan indikator:
- a. Jumlah prasarana, sarana dan fasilitas yang dibangun/terpasang/diadakan
 - b. Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik
 - c. Persentase kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan

Untuk mengoperasionalkan visi Dishubkominfo maka perlu dirumuskan misi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi tersebut adalah memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi Keempat RPJMD 2014-2019 yaitu:

1. Menjadikan *local government* (Pemerintah Kabupaten Donggala) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database kabupaten dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terkoneksi dalam satu *network operating center (noc)*;
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi dan telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta sosialisasi IT dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Donggala, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Donggala;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana transportasi dan telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi dan telematika secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan guna penjangkauan data dapat dilakukan secara *online* dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan menjangkau seluruh pelosok Kabupaten;
8. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
9. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
10. Pengembangan konten *website* Pemerintah Kabupaten Donggala yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;
11. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
12. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi dan teknologi informasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan Sistem transportasi yang baik dalam tatanan transportasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas angkutan jalan serta peraturan lain terkait yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo . Tata transportasi dimaksud dimulai dari daerah hingga

tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stackholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan tata transportasi daerah maupun nasional, antar ruang, antar waktu, antar fungsi dan antar susunan pemerintahan serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran tata transportasi harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dishubkominfo sebagai institusi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Kementerian Perhubungan, sebagai institusi pelaksana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian perhubungan adalah:

- i. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- ii. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;
- iii. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;
- iv. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
- v. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Donggala bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Donggala agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Donggala yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain:

- (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah;
- (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor;
- (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan pembangunan fasilitas perhubungan yang disesuaikan dengan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

3.5. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil dilakukan Isu-isu strategis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut ini:

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Donggala. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan

- 1) Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala;
- 2) Suasana Kerja yang kondusif dan dinamis;
- 3) Sarana dan Prasarana kerja pendukung telah tersedia
- 4) Arah Kebijakan publik yang mendukung kemudahan akses informasi
- 5) Kemampuan Menggalang partisipasi pemangku kepentingan sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan

Kelemahan

- 1) Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan;
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknis sesuai dengan kompetensi
- 3) Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana kerja belum optimal
- 4) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
- 5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;

Peluang Dan Tantangan Eksternal

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Donggala yaitu Peluang dan Ancamanyang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

Peluang

- 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;
- 2) Letak geografis Kabupaten Donggala yang sangat strategis
- 3) Rencana Beroperasinya kembali Pelabuhan Donggala;
- 4) Adanya peranmedia massa yang cukup besar dalam penyebar luasan informasi;

Tantangan

- 1) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat/pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
- 3) Belum meratanya informasi ke pelosok desa;
- 4) Luasnya wilayah kerja.
- 5) Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam satu tata transportasi

Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Saat ini

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dan telematika dapat disimpulkan, antara lain:

- i. Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;

- ii. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- iii. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- iv. Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan;
- v. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
- vi. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
- vii. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- i. Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dan telematika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

- ii. Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- i. Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- ii. Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :

- i. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- ii. Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Donggala diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang

akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Donggala.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyaikondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskanpemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untukmencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisislingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yangmenentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu: Kekuatanmemanfaatkan Peluang (S–O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S–T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W– O) danKelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W–T).

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas, dapat dituangkan dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Matrik SWOT

Tabel 3.4. ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF DAN PILIHAN DENGAN ANALISIS SWOT

<p style="text-align: center;">Ale</p> <p style="text-align: center;">Ali</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala; 2. Suasana Kerja yang kondusif dan dinamis; 3. Sarana dan Prasarana Kerja Pendukung yang telah tersedia 4. Arah Kebijakan Publik yang mendukung kemudahan akses informasi 5. Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya disiplin kerja dan pemahaman dan pelaksanaan kerja sesuai tupoksi oleh sebagian pegawai; 2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang teknis yang sesuai dengan kompetensinya; 3. Pelaksanaan dan evaluasi berdasarkan rencana kerja belum optimal 4. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan Database sehingga ketersediaan data tidak lengkap dan akurat 5. Kurang optimalnya peralatan Pendukung yang dimiliki
	<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok kabupaten Donggala 2. Letak Geografis Kabupaten Donggala yang sangat strategis 3. Rencana Beroperasinya kembali pelabuhan Donggala 	<p style="text-align: center;">(S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan Angkutan di seluruh Wilayah kabupaten Donggala 2. Peningkatan Kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan pelayanan 3. Menggalang Partisipasi pemangku Kepentingan dalam rangka

	mendukung pelaksanaan kegiatan	rencana kerja
4. Adanya peran media masa yang cukup besar dalam penyeberluasan informasi	4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis	4. Peningkatan Pengelolaan database dalam rangka pengutan informasi
Tantangan (T)	(S-T)	(W-T)
1. Masih rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu-lintas	1. Mengoptimalkan kemampuan SDM dan Prasarana dan Sarana yang tersedia untuk memberikan kesadaran masyarakat berlalu-lintas	1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka peningktan Pelayana Publik
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi	2. Menggalang partisipasi pemangku kepentingan sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan	2. Mendayagunakan kemampuan pegawai dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
3. Belum meratanya Informasi Keseluruh Pelosok Desa	3. Mengoptimalkan Arah kebijakan Publik serta penggalangan partisipasi pemangku kepentingan dalam penyebar luasan informasi	3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk dapat diakses oleh masyarakat
4. Luasnya Wilaya Kerja	4. Pemanfaatan sarana dan Prasarana pendukung yang tersedia dalam menunjang kegiatan	4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang kegiatan.
5. Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam satu tata transportasi	5. Mengoptimalkan Partisipasi pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan kegiatan	5. Pelaksanaan dan evaluasi kerja secara bersama antar pemerintah daerah

3.5.2 Analisis faktor Penentu Keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala dan masyarakat serta kalangan bisnis serta menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadikan *local government* (Pemerintah Kabupaten Donggala) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database kabupaten dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terkoneksi dalam satu *network operating center (noc)*;
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi dan telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta sosialisasi IT dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Donggala, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Donggala;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana transportasi dan telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi dan telematika secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan guna penjarangan data dapat dilakukan secara *online* dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan menjangkau seluruh pelosok Kabupaten;
8. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
9. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
10. Pengembangan konten *website* Pemerintah Kabupaten Donggala yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;
11. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
12. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi dan teknologi informasi.

3.5.3 Faktor-faktor Penentu keberhasilan

Berdasarkan analisis faktor keberhasilan maka dirumuskan factor penentu keberhasilan (FPK) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga mampu bekerja, cepat, tepat efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

2. Peningkatan Infrastruktur dibidang teknologi informasi sehingga mampu memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan penyampaian/akses informasi/data.
3. Pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh dan rutin terhadap segala pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang diambil agar dapat mengantisipasi segala permasalahan yang timbul secara cepat dan tepat
4. Adanya kerja sama dan sharing informasi antar lintas SKPD untuk mencapai keberhasilan tujuan bersama.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus

Visi

Dengan mengacu pada visi Bupati Donggala, yaitu : Kabupaten Donggala yang Maju dan Kompetitif Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Pembangunan Berkelanjutan, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembannya menjabarkan visi tersebut secara teknis dan operasional dengan mencanangkan visi :

“ Mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif dan Efisien Melalui Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan”.

Misi

Terciptanya kondisi dinamis dan kondusif bagi terselenggaranya pelayanan angkutan umum, komunikasi dan informatika secara tertib, efektif dan efisien melalui peningkatan SDM aparatur, fasilitas sarana dan prasarana, serta upaya pengawasan pengendalian dan penertiban terpadu berdasarkan norma-norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Efektif mencakup keselamatan (*safety*) yaitu terhindarnya kecelakaan akibat faktor internal transportasi, terjangkaunya jaringan transportasi seluas mungkin (*high accessibility*) sehingga terwujudnya keterpaduan antar dan intra moda dalam jaringan prasarana dan pelayanan, tercukupinya kapasitas sarana dan prasarana (*sufficient capacity*), teratur (*regular*), lancar dan cepat (*smooth and speedy*), mudah dicapai (*convenient*), tepat waktu (*punctuality*), nyaman (*comfort*) dengan tarif terjangkau, tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, aman (*secure*), berpolusi rendah (*low pollution*) dan handal.

Efisien berarti mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum. Sedangkan utilitas merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem perhubungan yang dapat dinyatakan dengan indikator seperti faktor muat penumpang, barang dan tingkat penggunaan sarana dan prasarana.

Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menunjang penyelenggaraan dan

pelayanan transportasi baik di darat, laut dan udara sehingga efektifitas dan efisiensi dapat dicapai secara optimal.

E-Government dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel.

4.1.2 Misi

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

MISI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Meningkatkan Sarana/Prasarana dan fasilitas di Bidang Perhubungan dan Kominfo
3. Meningkatkan Keamanan, Keselamatan Lalu-Lintas Angkutan Jalan dan Laut
4. Transparansi Informasi Publik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, seperti tersebut dibawah ini:

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representatif, akomodatif, aman, lancar, tertib serta efisien
3. Terciptanya arus lalu-lintas yang aman dan lancar
4. Terpenuhinya akses Informasi dan Komunikasi diseluruh wilayah kabupaten donggala

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah

Adapun **Sasaran Jangka Menengah** yang hendak dicapai adalah :

1. Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
3. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum di seluruh wilayah Kabupaten Donggala
4. Perencanaan Sistem Transportasi yang terpadu
5. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan fasilitas Perhubungan
6. Keselamatan dan Keamanan lalu lintas pengguna Jalan
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu-lintas secara terpadu dan lintas sektoral
8. Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna jasa telekomunikasi

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dishubkominfo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten	Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	1	4	5	6	8
2.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representatif, akomodatif, aman, lancar, tertib serta efisien	1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum di seluruh wilayah Kabupaten Donggala	1. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/diadakan	12	12	12,3	12,3	12,4
		2. Perencanaan Sistem Transportasi yang terpadu	2. Jumlah Dokumen Rencana Induk	1	1	1	1	1

			Perhubungan yang disusun					
		Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana, Prasaranan dan fasilitas Perhubungan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi dengan baik	30	44	56	63	63
3.	Terciptanya arus lalu-lintas yang aman dan lancar	1. Keselamatan dan Keamanan lalu lintas pengguna Jalan 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu-lintas secara terpadu dan lintas sektoral	1. Jumlah Prasarana keselamatan lalu-lintas yang diadakan 2. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan yang dibuat	9 Unit 2 Dok	100 unit 2 Dok	7 Unit 2 Dok	100 Unit 2 dok	4 Unit 2 Dok

4.	Terpenuhinya akses Informasi dan Komunikasi diseluruh wilayah kabupaten donggala	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna jasa telekomunikasi	1. Jumlah Sarana dan Prasarana dibidang ICT yang dibangun/ diadakan	1	6	6	6	6
			2. Jumlah Mas Media yang dibina	1	2	5	5	5

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Donggala selama lima tahun mendatang (2015-2019), yaitu:

1. Peningkatan SDM aparatur, Meningkatnya kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Peningkatan motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas di bidang Perhubungan dan kominfo
5. Identifikasi rencana Kebutuhan Anggaran Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Kominfo
6. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan dan kominfo
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan berlalu-lintas
8. Sosialisasi dan Temu wicara kepada masyarakat
9. Monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terpadu
10. Pembangunan sarana dan prasarana di bidang Kominfo

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala adalah:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk diklat kedinasan dan diklat lainnya
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana
4. Alokasi anggaran berorientasi pada pembangunan infrastruktur
5. Alokasi dalam rangka penyusunan Rencana induk perhubungan
6. Optimalisasi sarana, Prasarana dan fasilitas perhubungan
7. Alokasi anggaran dalam rangka pengadaan sarana/prasarana keselamatan berlalu-lintas
8. Pemenuhan hak dasar dan peningkatan Pelayanan dalam Berjalan-Lintas
9. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat
10. Alokasi anggaran pada bidang ICT
11. Pengolahan data/informasi berbasis ICT

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif dan Efisien Melalui Pembangunan Sumber Daya yang Berkelanjutan			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan birokrasi Pemerintahan yang profesional dan kompeten	1. Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1. Peningkatan SDM aparatur 2. Peningkatan motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	1. Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 2. Peningkatan alokasi anggaran untuk diklat kedinasan dan diklat lainnya 3. Peningkatan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana
MISI II : Meningkatkan Sarana/Prasarana dan Fasilitas di Bidang Perhubungan dan Kominfo			
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representatif, akomodatif, aman, lancar, tertib serta efisien	1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum di seluruh wilayah Kabupaten Donggala 2. Perencanaan Sistem Transportasi yang terpadu 3. Pemeliharaan, dan perbaikan Sarana, Prasarana dan fasilitas Perhubungan	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas di bidang Perhubungan dan kominfo 2. Identifikasi rencana Kebutuhan Anggaran Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Kominfo 3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan dan kominfo	1. Alokasi anggaran berorientasi pada pembangunan infrastruktur 2. Alokasi dalam rangka penyusunan Rencana induk perhubungan 3. Optimalisasi sarana, Prasarana dan fasilitas perhubungan

MISI III : Meningkatkan Keamanan, Keselamatan Lalu-Lintas Angkutan Jalan dan Laut

1. Terciptanya arus lalu-lintas yang aman dan lancar	1. Keselamatan dan Keamanan Lalu-Lintas Pengguna jalan 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu-lintas secara terpadu dan lintas sektoral	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan berlalu-lintas 2. Sosialisasi dan Temu wicara kepada masyarakat 3. Monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terpadu	1. Alokasi anggaran dalam rangka pengadaan saran/prasarana keselamatan berlalu-lintas 2. Pemenuhan hak dasar dan peningkatan Pelayanan dalam Berlalu-Lintas 3. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat
--	---	---	---

MISI IV : Transparansi Informasi Publik

Terpenuhinya Akses informasi dan Komunikasi Keseluruh wilayah kabupaten Donggala	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna jasa telekomunikasi	Pembangunan sarana dan prasarana di bidang Kominfo	1. Alokasi anggaran pada bidang ICT 2. Pengolahan data/informasi berbasis ICT
--	---	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatannya:

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan perlengkapan gedung;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
5. Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan internet;

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatannya : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatannya :

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
4. Pengadaan lampu Penerang Jalan Umum

7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Kegiatannya :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan.
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
- Kegiatannya :
1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
 2. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan;
 3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
 4. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
 5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 6. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum
9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Kegiatannya :
1. Pembangunan gedung Terminal.
10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Kegiatannya :
1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
 2. Pengadaan marka jalan;
 3. Pengadaan pagar pengaman jalan.
11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- Kegiatannya :
1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
 2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

12. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Kegiatannya :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi;
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
6. Pengembangan media Elektronik
7. Monitoring dan evaluasi jaringan internet;

13. Program Kerjasama Informasi dengan mas media

Kegiatannya :

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
2. Kerjasama informasi dengan mas media;
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

14. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Transportasi

Kepulauan antar Desa / Pulau-pulau Di daerah tertinggal

1. Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu;
2. Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang
3. Pengadaan Angkutan Perintis

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dishubkominfo Kab. Donggala Tahun 2014 – 2019 :

Visi : Mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Komunikasi dan Informatika yang Handal efektif dan efisien Melalui Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan:
Misi :
 - Peningkatan SDM
 - Peningkatan Sarana, Prasarana dan fasilitas Perhubungan dan Kominfo
 - Pengendalian, Pengawasan dan penertiban di bidang Perhubungan dan Kominfo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2013	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada 2019			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten	Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi • Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	90%	90%	1.658.905.000	93%	2.050.000.000	95%	2.050.000.000	100%	2.270.370.323	100%	2.383.888.839	100%	2.503.083.281		
					12 bln	12 bln	125.200.000	12 bln	250.000.000	12 bln	250.000.000	12 bln	270.370.323	12 bln	283.888.839	12 bln	253.083.281	Sekr	
					12 bln	12 bln	1.533.705.000	12 bln	1.800.000.000	12 bln	1.800.000.000	12 bln	2.000.000.000	12 bln	2.100.000.000	12 bln	2.250.000.000	Sekr	

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien	100 %	100 %	1.187.200.000	100 %	81.230.385	100 %	100.000.000	100 %	441.000.000	100 %	463.050.020	100 %	486.202.500	
			Kegiatan :															
			• Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Pkt	1 pkt	130.200.000	-	-	1 Pkt	100.000.000	1 Pkt	100.000.000	1 Pkt	163.050.000	1 Pkt	200.000.000	Sekr
			• Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit	1 Unit	17.000.000	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	8 Unit	150.000.000	16 Unit	86.202.500	Sekr
			• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana/ Prasarana kantor yang diadakan	8 Unit	46 Unit	1.040.000.000	8 Unit	81.230.385	-	-	8 Unit	91.000.000	8 Unit	150.000.000	16 Unit	200.000.000	Sekr
		Meningkatkan Kualitas SDM Apartaur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan SDM Aparatur Bidang Perhubungan Kominfo			15.000.000	6 Org	60.000.000	6 Org	60.000.000	3 Org	33.075.000	3 Org	34.728.750	3 Org	36.465.188	
			Kegiatan :															
			• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis			15.000.000	6 Org	60.000.000	6 Org	60.000.000	3 Org	33.075.000	3 Org	34.728.750	3 Org	36.465.188	Sekr

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representatif, akomodatif, aman, lancer, tertib serta efisien	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana angkutan umumdi seluruh wilayah kabupaten donggala	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/di adakan	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/T ransportasi Kepulauan antar Desa / Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Tertinggal	Persentase termanfaatanny a Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang di Bangun	16 Unit	8 Unit	3.468.806.000	8 Unit	3.543.820.000	8 Unit	3.631.986.000	8 Unit	3.724.585.300	8 Unit	3.821.314.565	8 Unit	3.912.380.293				
			Kegiatan :																		
			• Pembangunan Dermaga/Ta mbatan Perahu	Jumlah dermaga/tambat an perahu yang dibangun	8 Unit	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	4 Unit	1.463.400.000	Bid. Laut	
			• Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang	Jumlah kapal perintis yang diadakan	8 Unit	4 Unit	507.006.000	4 Unit	507.100.000	4 Unit	516.600.000	4 Unit	526.600.000	4 Unit	536.600.000	4 Unit	536.600.000	4 Unit	536.600.000	Bid. Laut	
• Pengadaan Angkutan Perintis	Jumlah Kendaraan Angkutan Perintis yang diadakan	10 Unit	4 Unit	1.498.400.000	4 Unit	1.573.320.000	4 Unit	1.651.986.000	4 Unit	1.734.585.300	4 Unit	1.821.314.565	4 Unit	1.912.380.293	4 Unit	1.912.380.293	Bid. Laut				

Perencanaan Sistem Transportasi Yang Terpadu	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase di Manfaatkannya Dokumen Rencana Induk Perhubungan, Audit Penilaian Retribusi Parkir Tepi Jalan	-	-	-	1 Dok	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Perhubungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perhubungan, Audit Penilaian Retribusi Parkir Tepi Jalan	-	-	-	1 Dok	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Persentase Termanfaatkannya Prasarana dan Prasarana Perhubungan Yang dibangun	5	-	-	-	-	1 Unit	600.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	747.000.000	1 Unit	420.344.346		
		Kegiatan : Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang dibangun	5	-	-	-	-	1 Unit	600.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	747.000.000	1 Unit	420.344.346	LLAJ	

	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah sarana/Prasarana Perhubungan yang berfungsi dengan baik	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Sarana/Prasarana Perhubungan yang di Perbaiki	30	-	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	94.047.576	-	-	2 Unit	100.000.000	63 Unit	200.000.000		
				Jumlah Sarana/Prasarana Perhubungan yang diperbaiki	30	-	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	94.047.576	-	-	2 Unit	100.000.000	63 Unit	200.000.000	LLAJ	
	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Persentase Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : • Pekan Keselamatan Lalu Lintas • Koordinasi Dalam Pelayanan Angkutan	Persentase termanfaatkannya Sopir/Pengendara yang dibina	1X	-	-	2X	100.000.000	2X	100.000.000	2X	150.000.000	2X	150.000.000	2X	150.000.000		
				Jumlah Sopir/Pengendara yang Memperoleh Pembinaan	1X	-	-	2X	41.500.000	2X	50.000.000	2X	75.000.000	2X	75.000.000	2X	75.000.000	LLAJ	
				Jumlah Rapat yang di ikuti	1X	-	-	2X	58.500.000	2X	50.000.000	2X	75.000.000	2X	75.000.000	2X	75.000.000	LLAJ	

Terciptanya arus lalu-lintas yang aman dan lancar	Keselamatan dan Keamanan lalu-Lintas Pengguna Jalan	Jumlah Prasarana lalu-Lintas yang diadakan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu-Lintas Kegiatan :	Persentase dimanfaatkan Prasarana Lalu Lintas	233	9 Unit	485.000.000	100 Unit	530.000.000	7 Unit	550.000.000	100 Unit	570.000.000	4 Unit	600.000.000	453 Unit	610.000.000		
			• Pengadaan rambu lalu-Lintas	Jumlah Prasarana Lalu Lintas yang Terpasang	233	9 Unit	385.000.000	100 Unit	430.000.000	7 Unit	400.000.000	100 Unit	410.000.000	4 Unit	430.000.000	453 Unit	440.000.000	LLAJ	
			• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LLAJ	Jumlah Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	85.000.000	LLAJ	
			• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Laut	Jumlah Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	85.000.000	Bid. Laut	

Terpenuhi akses informasi dan komunikasi Di seluruh wilayah kabupaten donggala	Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna jasa telekomunikasi	Jumlah sarana dan prasarana ICT yang dibangun/diadakan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Persentase Termanfaatkan ya Kelompok Informasi Masyarakat	1 Unit	1 Unit	200.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	310.000.000	6 Unit	450.000.000	6 Unit	461.768.118	25 Unit	500.000.000		
			Kegiatan :																
			<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi da Informasi Peningkatan dan Penyediaan Siskompad E-Governmnet 	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang di Bentuk	1 Unit	1 Unit	-	6 Unit	80.000.000	6 Unit	80.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	25 Unit	100.000.000		Bid. Kom
				Jumlah Sistem Komunikasi yang Terpasang	8 Unit	8 Unit	200.000.000	8 Unit	220.000.000	8 Unit	230.000.000	8 Unit	350.000.000	8 Unit	361.768.118	8 Unit	400.000.000		Bid. Kom
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Termanfaatkan ya Data Kajian/Penelitian Bidang Kominfo	1 Dok	-	-	1 Dok	150.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan :																
			Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah Data Kajian/Penelitian Bidang Kominfo	1 Dok	-	-	1 Dok	150.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-		Bid. Kom

			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo	Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang di Bina	1 Org	-	-	4 Org	40.000.000	5 Org	50.000.000	6 Org	75.000.000	8 Org	100.000.000	25 Org	100.000.000		
			Kegiatan :																
			Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM Bidang Kominfo	1 Org	-	-	4 Org	40.000.000	5 Org	50.000.000	6 Org	75.000.000	8 Org	100.000.000	25 Org	100.000.000	Bid. Kom	
		Jumlah mas Media yang dibina	Program Kerjasama Informasi dan media massa	Persentase Pemanfaatan KerjasamaInfor masi dan Media Masaa	-	-	-	1 Mas Medi a	10.000.000	2 Mas Medi a	25.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000		
			Kegiatan :																
			Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Mas Media yang Menyebarkan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	1 Mas Medi a	10.000.000	2 Mas Medi a	25.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000	5 Mas Medi a	125.000.000	Bid. Kom	

			Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Persentase Termanfaatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan	2 Unit	4 Unit	500.000.000	-	-	-	-	4 Unit	551.250.000	4 Unit	578.812.500	4 Unit	607.753.125		
			Kegiatan :																
			Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan	Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang di Bangun	2 Unit	4 Unit	500.000.000	-	-	-	-	4 Unit	551.250.000	4 Unit	578.812.500	4 Unit	607.753.125	Bid. Kom	

5.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi;
4. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
5. Kelompok swadaya masyarakat (KIM – Kelompok Informasi Masyarakat);
6. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;

5.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Donggala;
2. APBD Propinsi Sulawesi Tengah;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).

Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Dishubkominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dishubkominfo dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Donggala 2014 – 2019.

Indikator kinerja Dishubkominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tingkatlayanan administrasi yang tepat waktu	90 %	92 %	93 %	93 %	94 %	95 %	95 %
2	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	1	4	4	5	8	8	8
3	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/diadakan	12	12	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4

4	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perhubungan yang disusun	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi dengan baik	30	44	56	63	63	63	63
6	Jumlah Prasarana keselamatan lalu-lintas yang diadakan	99	100	50	80	100	100	B
7	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
8	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan yang dibuat	2	2	2	2	2	2	2
9	Jumlah Sarana dan Prasarana dibidang ICT yang dibangun/ diadakan	1	6	6	6	6	6	6
10	Jumlah Mas Media yang dibina	1	2	5	5	5	5	5

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2015 – 2019 dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala tahun – tahun sebelumnya.

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA**

TAMRIN H. SMAUANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19550403 197709 1 001

